

STRATEGI PEMERINTAH DESA KWANGSAN KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO DALAM MENINGKATKAN INDEKS KETAHANAN SOSIAL (IKS) PADA STATUS DESA MANDIRI

Vika Armelya Putri

Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
vika.22142@mhs.unesa.ac.id

Trenda Aktiva Oktariyanda

Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
trendaoktariyanda@unesa.ac.id

Dra. Meirinawati

Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
meirinawati@unesa.ac.id

Eva Hany Fanida

Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
evafanida@unesa.ac.id

Abstrak

Penerapan manajemen strategis dalam peningkatan Indeks Ketahanan Sosial (IKS) merupakan upaya pemerintah desa dalam memperkuat kohesi sosial dan stabilitas masyarakat di tengah dinamika perubahan sosial. Pemerintah Desa Kwangsan mengimplementasikan strategi peningkatan ketahanan sosial sebagai bagian dari pembangunan sosial berbasis partisipasi masyarakat dan inovasi pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen strategis Pemerintah Desa Kwangsan dalam meningkatkan Indeks Ketahanan Sosial dengan menggunakan tahapan manajemen strategis menurut Ahmad (2020) yang meliputi formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari perangkat desa dan masyarakat Desa Kwangsan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen strategis di Desa Kwangsan telah berjalan secara progresif dan adaptif. Pada tahap formulasi, pemerintah desa telah mengidentifikasi kekuatan berupa modal sosial dan kapasitas kelembagaan, serta tantangan berupa menurunnya partisipasi pada beberapa indikator IKS. Implementasi strategi diwujudkan melalui penguatan kegiatan sosial dan inovasi pelayanan publik berbasis digital. Evaluasi dilakukan melalui peninjauan program dan penyesuaian pendekatan kegiatan, meskipun belum sepenuhnya didukung indikator kinerja yang terukur dan terdokumentasi secara sistematis.

Kata Kunci: Manajemen Strategis, Indeks Ketahanan Sosial, Implementasi Strategi, Evaluasi Strategi, Pemerintah Desa.

Abstract

The implementation of strategic management in improving the Social Resilience Index (Indeks Ketahanan Sosial/IKS) represents an effort by village governments to strengthen social cohesion and community stability amid social dynamics and modernization. The Government of Kwangsan Village has implemented strategies to enhance social resilience through community participation and public service innovation. This study aims to analyze the strategic management process of Kwangsan Village Government in improving the Social Resilience Index by applying the strategic management framework proposed by Ahmad (2020) and the strategy evaluation perspective of David & David (2017), which includes strategy formulation, implementation, and evaluation. This research employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The informants consisted of village officials and community members. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that strategic management in Kwangsan Village has been implemented in a progressive and adaptive manner. In the formulation stage, the village government identified internal strengths such as social capital and institutional capacity, as well as challenges including declining participation in several IKS indicators. Strategy implementation was carried out

through strengthening social activities and digital-based public service innovations. Strategy evaluation was conducted through program review and adjustment of approaches; however, it has not been fully supported by systematically documented and measurable performance indicators.

Keywords: *Strategic Management, Social Resilience Index, Strategy Implementation, Strategy Evaluation, Village Government.*

PENDAHULUAN

Administrasi publik merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari bagaimana negara mengelola kepentingan umum secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bernegara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perkembangannya, administrasi publik tidak hanya berfokus pada birokrasi dan pengambilan keputusan, tetapi juga pada dinamika hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Praktik administrasi publik modern menuntut adanya profesionalisme aparatur, kemampuan manajerial, serta integritas dalam menjaga kepercayaan publik.

Seiring dengan perkembangan tersebut, paradigma administrasi publik mengalami pergeseran menuju pendekatan yang lebih partisipatif dan kolaboratif. Pendekatan *collaborative governance* menempatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam posisi sejajar untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan publik. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi melalui konsep *e-government* juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik, termasuk di tingkat desa.

Reformasi administrasi publik di Indonesia diwujudkan melalui kebijakan desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah, termasuk desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan legitimasi bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara mandiri. Dalam konteks ini, desa tidak lagi hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi menjadi aktor utama dalam pembangunan lokal.

Salah satu instrumen untuk mengukur tingkat perkembangan desa adalah Indeks Desa Membangun (IDM), yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan. Dari ketiga dimensi tersebut, Indeks Ketahanan Sosial (IKS) menjadi aspek yang paling dinamis karena sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, aktivitas sosial, serta kualitas pelayanan dasar. Kondisi ini menyebabkan IKS sering menjadi faktor penentu dalam naik turunnya status desa.

Indeks Ketahanan Sosial (IKS) merupakan indikator penting dalam menilai kapasitas masyarakat desa dalam menjaga stabilitas dan kohesi sosial. Ketahanan sosial tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, tetapi juga mencakup

partisipasi masyarakat, solidaritas sosial, rasa aman, serta keberfungsian lembaga kemasyarakatan. Dalam perspektif administrasi publik, ketahanan sosial menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah dengan jumlah desa terbesar di Indonesia sekaligus memiliki jumlah Desa Mandiri tertinggi, yaitu sebanyak 2.800 desa atau sekitar 22,5% dari total nasional (BPS, 2024). Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu daerah penyumbang utama dengan 216 desa berstatus mandiri dari total 318 desa yang tersebar di 18 kecamatan berdasarkan data IDM tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar desa di Kabupaten Sidoarjo telah mencapai tingkat kemandirian yang tinggi. Namun demikian, capaian tersebut juga memperlihatkan adanya variasi antarwilayah, di mana desa dengan karakteristik semi-perkotaan dan dukungan infrastruktur yang memadai cenderung lebih cepat berkembang dibandingkan desa di wilayah pinggiran.

Walaupun IDM terdiri atas 3 dimensi, berbagai studi menunjukkan bahwa ketahanan sosial (IKS) merupakan dimensi yang paling fluktuatif dan paling sering menjadi faktor penyebab naik-turunnya status desa. Dimensi sosial sangat dipengaruhi oleh dinamika masyarakat, aktivitas lembaga desa, dan kualitas pelayanan dasar faktor yang tidak stabil seperti aspek ekonomi dan infrastruktur. Karena itu, banyak desa yang telah mencapai status mandiri secara administratif tetap berisiko mengalami penurunan peringkat apabila tidak mampu menjaga ketahanan sosialnya. Di Kabupaten Sidoarjo, yang memiliki ratusan desa dengan capaian IDM tinggi, persoalan konsistensi pada aspek sosial juga menjadi tantangan umum yang dihadapi pemerintah desa. Dengan demikian, fokus pada Indeks Ketahanan Sosial (IKS) menjadi penting karena dimensi inilah yang paling menentukan keberlanjutan status Desa Mandiri, sekaligus berada langsung dalam ruang kewenangan pemerintah desa untuk diperbaiki melalui strategi yang tepat.

Dalam konteks tersebut, Desa Kwangsansari menjadi salah satu contoh desa mandiri yang menonjol di Kabupaten Sidoarjo. Desa ini terletak di Kecamatan Sedati dengan luas wilayah 1,79 km² dan jumlah penduduk mencapai 3.873 jiwa (BPS, 2024). Untuk melihat posisi Desa Kwangsansari secara lebih komprehensif, berikut

disajikan perbandingan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024.

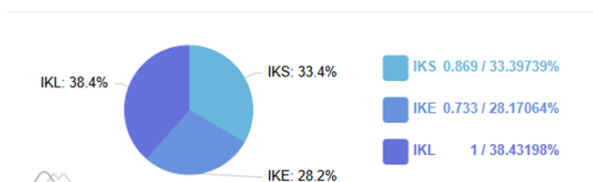
Tabel 1. Data Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Sedati, dan Desa Kwangsan Tahun 2024

Wilayah	Jumlah Desa	Rata-Rata Nilai IDM	Jumlah Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri (%)
Provinsi Jawa Timur	7.724	0.742	2.800	36,26%
Kabupaten Sidoarjo	322	0.786	216	67,08%
Kecamatan Sedati	16	0.802	6	37,5%
Desa Kwangsan	1	0.8673	1	100%

Sumber: Diolah dari Kemendes PDDT

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa Desa Kwangsan memiliki nilai IDM yang lebih tinggi dibandingkan wilayah di atasnya dan telah mencapai status Desa Mandiri. Meskipun demikian, capaian tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kekuatan pada seluruh dimensi pembangunan, khususnya pada aspek ketahanan sosial yang masih relatif lebih rendah dibandingkan dimensi lainnya.

Dalam konteks tersebut, komposisi Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Kwangsan menunjukkan adanya ketimpangan kontribusi antar dimensi, terutama pada Indeks Ketahanan Sosial (IKS) yang menjadi fokus penelitian ini.



Gambar 1. Komposisi Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Kwangsan Tahun 2024

Sumber: Kemendes PDDT, 2024

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024 dari Kementerian Desa PDDT, Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

memperoleh nilai IDM sebesar 0,8673 dengan status Desa Mandiri. Namun, kontribusi Indeks Ketahanan Sosial (IKS) terhadap komposit IDM hanya sebesar 33,39%, lebih rendah dibandingkan Indeks Ketahanan Lingkungan (38,43%) dan Indeks Ketahanan Ekonomi (28,17%) Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Desa Kwangsan telah berstatus mandiri, ketahanan sosial masyarakatnya masih relatif lemah. Beberapa indikator sosial seperti ketersediaan ruang publik (skor 1) dan sistem keamanan lingkungan atau siskamling (skor 1) menjadi catatan penting dalam rekomendasi IDM.

Secara geografis, Desa Kwangsan terletak di Kecamatan Sedati dan berada di wilayah yang berbatasan dengan kawasan perkotaan serta dekat dengan Bandara Internasional Juanda. Kondisi ini menjadikan Desa Kwangsan memiliki karakteristik semi-perkotaan (*urban fringe*) dengan dinamika sosial yang kompleks. Karakteristik tersebut berimplikasi pada pola partisipasi masyarakat yang cenderung fluktuatif, terutama dalam kegiatan sosial dan kelembagaan desa.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan organisasi kemasyarakatan. Hal ini berpotensi memengaruhi stabilitas ketahanan sosial serta keberlanjutan status Desa Mandiri apabila tidak diantisipasi dengan strategi yang tepat. Apabila kondisi ini tidak diperkuat, maka desa berpotensi mengalami penurunan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) yang dapat berdampak pada perubahan status desa. Hal ini menunjukkan bahwa status Desa Mandiri bersifat dinamis dan memerlukan upaya berkelanjutan dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat.

Sejumlah penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti pembangunan desa dari aspek ekonomi, pemberdayaan masyarakat, maupun inovasi kelembagaan. Namun, kajian yang secara spesifik membahas strategi pemerintah desa dalam meningkatkan Indeks Ketahanan Sosial (IKS) pada desa berstatus mandiri masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan memfokuskan pada strategi pemerintah desa dalam memperkuat ketahanan sosial sebagai upaya mempertahankan status Desa Mandiri.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan manajemen strategis yang mencakup formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi secara sistematis. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah desa untuk merancang kebijakan yang adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Desa Kwangsan dalam meningkatkan Indeks Ketahanan Sosial (IKS) pada status Desa Mandiri. Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian administrasi publik, khususnya terkait manajemen strategis di tingkat desa, serta memberikan manfaat praktis sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan pembangunan sosial yang lebih efektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena strategi pemerintah desa dalam meningkatkan Indeks Ketahanan Sosial (IKS) pada Desa Kwangsang. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali informasi secara komprehensif terkait proses perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kwangsang, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dengan subjek penelitian diantaranya yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kader Desa, serta masyarakat sebagai penerima manfaat program. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Fokus penelitian ini menggunakan teori Manajemen Strategis yang dikemukakan oleh Ahmad, (2020) yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu: (1) formulasi strategi, (2) implementasi strategi, dan (3) evaluasi strategi. Ketiga aspek tersebut digunakan untuk melihat bagaimana pemerintah desa merancang, melaksanakan, dan menilai strategi dalam upaya memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

Sumber data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi secara langsung di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan kegiatan, serta data Indeks Desa Membangun (IDM) yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian.

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang didukung dengan pedoman wawancara dan lembar observasi. Selanjutnya, analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2023) yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen strategis dalam sektor publik merupakan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam

jangka panjang. Dalam konteks pemerintahan desa, penerapan manajemen strategis menjadi penting untuk memastikan bahwa program pembangunan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta meningkatkan ketahanan sosial.

Di Desa Kwangsang, strategi pemerintah desa diarahkan pada peningkatan Indeks Ketahanan Sosial (IKS) melalui penguatan aspek kesehatan, pendidikan, dan sosial. Analisis dalam penelitian ini menggunakan kerangka manajemen strategis menurut Ahmad (2020), yang meliputi formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi.

1. Formulasi Strategi

Formulasi strategi di Desa Kwangsang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi riil masyarakat serta indikator dalam Indeks Ketahanan Sosial. Pada bidang kesehatan, pemerintah desa merumuskan program dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, seperti optimalisasi pelayanan posyandu yang terintegrasi serta pemberian makanan tambahan bagi kelompok rentan. Proses perumusan ini juga melibatkan kader kesehatan yang berperan sebagai sumber informasi utama mengenai kondisi masyarakat di lapangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan tidak hanya bersifat *top-down*, tetapi juga mempertimbangkan kondisi empiris di masyarakat. Meskipun demikian, tingkat partisipasi masyarakat dalam program kesehatan masih menunjukkan variasi, yang mengindikasikan bahwa penyebaran informasi belum sepenuhnya merata.

Pada bidang pendidikan, formulasi strategi dilakukan dengan menyesuaikan keterbatasan sarana pendidikan di dalam desa. Pemerintah desa lebih menekankan pada pemanfaatan akses pendidikan di wilayah sekitar, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan kader, serta pemberian bantuan perlengkapan sekolah bagi anak usia pendidikan. Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya adaptif terhadap kondisi desa, meskipun belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya terkait pendidikan nonformal yang masih belum tersedia.

Sementara itu, pada bidang sosial, pemerintah desa merumuskan strategi melalui optimalisasi program bantuan sosial, penguatan perlindungan anak melalui program PATBM, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan UMKM. Strategi yang dirumuskan tidak hanya berfokus pada bantuan, tetapi juga mengarah pada peningkatan kemandirian masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat keterbatasan dalam

penyampaian informasi kepada masyarakat sehingga tidak semua program dipahami secara menyeluruh.

Dengan demikian, formulasi strategi yang dilakukan Pemerintah Desa Kwangsan telah mencerminkan tahapan formulasi strategi menurut Ahmad (2020), karena disusun berdasarkan kondisi internal dan eksternal serta melibatkan aktor lokal seperti kader. Namun, masih terdapat kelemahan pada aspek komunikasi yang berdampak pada partisipasi masyarakat yang belum merata.

2. Implementasi Strategi

Implementasi strategi di Desa Kwangsan dilakukan melalui berbagai program yang berfokus pada peningkatan ketahanan sosial masyarakat. Pada bidang kesehatan, pelaksanaan strategi diwujudkan melalui kegiatan posyandu terintegrasi, pemberian makanan tambahan, serta program edukasi seperti Sekolah Orang Tua Hebat. Program-program tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi juga pada upaya promotif dan preventif. Peran kader kesehatan dalam menjangkau masyarakat juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan strategi, meskipun partisipasi masyarakat masih belum merata.

Berdasarkan pelaksanaan tersebut, dapat dilihat bahwa implementasi strategi pada bidang kesehatan telah berjalan dengan baik dan mendukung peningkatan ketahanan sosial masyarakat, khususnya pada aspek kesehatan. Namun demikian, tingkat partisipasi masyarakat yang belum merata menunjukkan bahwa masih diperlukan penguatan dalam penyebaran informasi dan keterlibatan masyarakat agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih luas.

Pada bidang pendidikan, implementasi strategi dilakukan melalui optimalisasi akses pendidikan ke luar desa, pemberian bantuan perlengkapan sekolah, serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan. Strategi ini menunjukkan adanya penyesuaian terhadap keterbatasan fasilitas pendidikan di desa, sehingga pelaksanaannya bersifat adaptif terhadap kondisi yang ada.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Desa Kwangsan:

“Dalam pelaksanaannya, masyarakat tetap bisa menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi

meskipun fasilitas sekolah lanjutan tidak tersedia di dalam desa. Untuk tingkat SMP dan SMA, masyarakat memanfaatkan sekolah yang berada di wilayah sekitar desa.”
(Wawancara, 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa implementasi strategi pendidikan lebih menekankan pada pemanfaatan akses eksternal dibandingkan penyediaan fasilitas internal. Pendekatan ini mencerminkan adanya strategi yang adaptif terhadap keterbatasan sarana prasarana pendidikan di desa.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ani sebagai salah satu warga:

“Kalau sekolah memang harus keluar desa, tapi sekarang juga ada kendala zonasi, jadi tidak selalu mudah untuk bisa masuk sekolah negeri.”
(Wawancara, 2026)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa dalam implementasi strategi pendidikan terdapat faktor eksternal yang turut mempengaruhi efektivitas akses pendidikan masyarakat. Meskipun secara geografis akses pendidikan tergolong dekat, kebijakan zonasi menjadi salah satu kendala dalam memperoleh akses pendidikan, khususnya pada sekolah negeri.

Selain itu, implementasi strategi juga dilakukan melalui pemberian bantuan perlengkapan sekolah kepada anak usia pendidikan. Bantuan ini diberikan secara rutin setiap tahun dan disesuaikan dengan kondisi anggaran desa. Program tersebut bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, sehingga keberlangsungan pendidikan anak tetap terjaga.

Berdasarkan pelaksanaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi strategi pada bidang pendidikan telah berjalan secara adaptif melalui pemanfaatan akses eksternal dan pemberian dukungan pendidikan. Namun demikian, keterbatasan pada aspek pendidikan nonformal serta kendala eksternal seperti kebijakan zonasi menunjukkan bahwa kontribusinya terhadap peningkatan ketahanan sosial, khususnya pada aspek pendidikan, belum optimal.

Pada bidang sosial, implementasi strategi dilakukan melalui penyaluran bantuan sosial, pelaksanaan program perlindungan anak berbasis masyarakat, serta kegiatan pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan UMKM. Selain itu, kegiatan sosial seperti forum anak desa juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan partisipasi dan kohesi sosial masyarakat. Pelaksanaan program sosial tersebut dapat dilihat pada dokumentasi kegiatan berikut:

Berdasarkan pelaksanaan tersebut, dapat dilihat bahwa implementasi strategi pada bidang sosial telah berjalan melalui kombinasi antara bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Program yang dijalankan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada upaya peningkatan kemandirian dan partisipasi masyarakat. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Rusmaningsih dan Kusumastuti (2023) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dan inovasi sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa serta memperkuat ketahanan sosial. Namun demikian, masih terdapat perbedaan persepsi terkait pemerataan bantuan serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan, sehingga kontribusinya terhadap peningkatan ketahanan sosial belum optimal.

3. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi di Desa Kwangsan dilakukan melalui kegiatan monitoring dan koordinasi antara pemerintah desa dan kader sebagai pelaksana di lapangan. Pada bidang kesehatan, evaluasi dilakukan dengan melihat pelaksanaan program seperti posyandu, pemberian makanan tambahan, serta kegiatan edukasi masyarakat. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program telah berjalan dengan baik, namun tingkat partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih luas.

Pada bidang pendidikan, evaluasi dilakukan dengan memperhatikan akses pendidikan masyarakat serta efektivitas bantuan yang diberikan. Meskipun strategi yang dijalankan telah mampu mendukung keberlangsungan pendidikan, masih terdapat keterbatasan pada aspek pendidikan nonformal serta kendala

eksternal yang mempengaruhi akses pendidikan masyarakat.

Sementara itu, pada bidang sosial, evaluasi dilakukan dengan melihat ketepatan sasaran bantuan, pelaksanaan program perlindungan anak, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program sosial telah berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, namun masih terdapat persepsi terkait ketidakmerataan bantuan serta keterbatasan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan.

Secara keseluruhan, strategi Pemerintah Desa Kwangsan dalam meningkatkan Indeks Ketahanan Sosial telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan manajemen strategis, mulai dari perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Namun demikian, masih diperlukan penguatan pada aspek komunikasi, pemerataan program, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar strategi yang dijalankan dapat memberikan hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo yang telah memberikan izin dan mendukung pelaksanaan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh informan penelitian, khususnya Kepala Desa, Sekretaris Desa, kader desa, serta masyarakat Desa Kwangsan yang telah bersedia memberikan informasi dan data yang diperlukan selama proses penelitian berlangsung. Selain itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan penelitian ini.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi Pemerintah Desa Kwangsan dalam meningkatkan Indeks Ketahanan Sosial (IKS), dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan manajemen strategis telah berjalan melalui tiga tahapan utama, yaitu formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi.

Pada tahap formulasi strategi, pemerintah desa telah menyusun program dengan mempertimbangkan kondisi riil masyarakat serta melibatkan kader sebagai sumber informasi di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan telah mengarah pada pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan pada aspek komunikasi yang menyebabkan partisipasi masyarakat belum merata.

Pada tahap implementasi strategi, berbagai program telah dilaksanakan pada bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial. Bidang kesehatan menunjukkan pelaksanaan yang cukup optimal melalui kegiatan promotif dan preventif seperti posyandu terintegrasi dan edukasi masyarakat. Pada bidang pendidikan, strategi dilakukan secara adaptif melalui pemanfaatan akses pendidikan di luar desa serta pemberian bantuan pendidikan, meskipun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan pendidikan nonformal dan faktor eksternal berupa kebijakan zonasi. Sementara itu, pada bidang sosial, implementasi dilakukan melalui bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat, namun masih terdapat perbedaan persepsi terkait pemerataan bantuan dan partisipasi masyarakat.

Pada tahap evaluasi strategi, pemerintah desa telah melakukan monitoring dan koordinasi dengan kader sebagai pelaksana di lapangan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program yang dijalankan telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan ketahanan sosial masyarakat, namun belum optimal dalam aspek pemerataan manfaat dan keterlibatan masyarakat.

Secara keseluruhan, strategi Pemerintah Desa Kwangsan telah sesuai dengan tahapan manajemen strategis, namun masih memerlukan penguatan pada aspek komunikasi, pemerataan program, dan peningkatan partisipasi masyarakat agar dapat meningkatkan Indeks Ketahanan Sosial secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Desa Kwangsan perlu menyusun indikator kinerja strategis yang terintegrasi secara langsung dengan komponen Indeks Ketahanan Sosial (IKS). Indikator tersebut dapat dituangkan dalam bentuk *dashboard monitoring* desa yang diperbarui secara berkala (misalnya per triwulan), dengan memuat target dan capaian seperti persentase kehadiran posyandu, jumlah warga yang terlibat dalam kegiatan sosial, serta jumlah penerima bantuan yang tervalidasi. Penyusunan indikator ini dapat melibatkan perangkat desa dan kader sebagai pengumpul data lapangan.
2. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keamanan lingkungan, pemerintah desa dapat mengembangkan program “*Kwangsan Smart Security*”, yaitu sistem keamanan berbasis kombinasi teknologi dan partisipasi warga. Program ini dapat berupa pemasangan CCTV di titik rawan, pembentukan grup koordinasi keamanan berbasis WhatsApp per RT, serta

penerapan jadwal ronda fleksibel berbasis kesepakatan warga. Selain itu, dapat ditunjuk koordinator keamanan lingkungan di setiap RT sebagai penghubung antara warga dan pemerintah desa.

3. Dalam rangka memperkuat pendidikan nonformal, pemerintah desa dapat membentuk program “Kelas Warga Kwangsan” yang dilaksanakan secara berkala di balai desa atau tingkat RT/RW. Program ini dapat berupa pelatihan kewirausahaan, kelas literasi digital, pelatihan pengelolaan keuangan rumah tangga, serta pelatihan keterampilan praktis lainnya. Pelaksanaan kegiatan dapat bekerja sama dengan dinas terkait atau menghadirkan narasumber dari luar.
4. Pemerintah desa perlu mengoptimalkan peran kelembagaan lokal dengan membentuk “Tim Penggerak Sosial Desa” yang terdiri dari unsur RT, RW, PKK, dan Karang Taruna. Tim ini dapat bertugas merancang dan melaksanakan kegiatan rutin seperti kerja bakti bulanan, forum warga, serta kegiatan sosial lainnya. Pemerintah desa dapat memberikan pelatihan manajemen kegiatan kepada tim ini agar pelaksanaan program lebih terstruktur.
5. Mekanisme evaluasi program desa perlu diperkuat melalui penyusunan laporan evaluasi berbasis format baku yang disusun secara berkala (misalnya setiap 6 bulan). Laporan ini dapat memuat indikator capaian program, tingkat partisipasi masyarakat, serta kendala pelaksanaan. Selain itu, hasil evaluasi dapat dipresentasikan dalam forum musyawarah desa sebagai bentuk transparansi dan bahan perbaikan program.
6. Inovasi pelayanan publik berbasis digital melalui aplikasi SIPRAJA dan PLAVON perlu terus dikembangkan, tidak hanya sebagai sarana pelayanan administrasi, tetapi juga sebagai media komunikasi publik. Pemerintah desa dapat memanfaatkan platform tersebut untuk menyebarluaskan informasi kegiatan, jadwal program, serta edukasi kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan akses informasi dan partisipasi warga secara lebih luas.
7. Pemerintah desa perlu memperkuat komunikasi publik dengan membentuk agenda rutin forum warga, seperti pertemuan bulanan di tingkat RT/RW atau forum dialog desa setiap triwulan. Forum ini dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan program desa, menerima aspirasi

masyarakat, serta mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

8. Pemerintah Desa Kwangsan dapat menginisiasi program “*Kwangsan Community Forum*”, yaitu forum interaksi warga berbasis komunitas yang dilaksanakan secara fleksibel, baik secara langsung maupun daring. Forum ini dapat membahas isu-isu sosial seperti keamanan, pendidikan, dan kegiatan masyarakat, serta menjadi wadah kolaborasi antarwarga. Kegiatan ini dapat dijadwalkan secara rutin, misalnya setiap akhir pekan atau menyesuaikan waktu luang masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. (2020). *Manajemen Strategis*. CV. Nas Media Pustaka.
- Antara News. (2024). Wamendes sebut desa mandiri bertambah lebih dari 17 ribu sejak 2015. <https://www.antaraneews.com/berita/4381470/wamendes-sebut-desamandiri-bertambah-lebih-dari-17-ribu-sejak-2015>
- Astriana, S., & Khoirunurrofik, K. (2024). *Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan: Bukti Empiris dari Tingkat Kabupaten Kota di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 13(1), 15–29.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2021. *Statistik Ketahanan Sosial Hasil Susenas Modul Hansos 2020*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2025). Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi, 2024. Diakses dari: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YkVWVWFUyNTJTlVVGpCeFdFVTNaMk5wUzFaUFFUMDkjMw==/jumlah-desa-kelurahan-menurut-provinsi--2022.html>
- Bahransyaf, D., dan Probosiwi, R. 2013. “Membangun Ketahanan Sosial di Desa Serakapi: Sebuah Replikasi Model.” *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 1: 225–236.
- Bryson, J., dan George, B. 2020. *Strategic Management in Public Administration*. Oxford: Oxford University Press.
- David, F. R., dan David, F. R. 2017. *Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases*. Edisi ke-17. Harlow: Pearson Education.
- Djafri, N. 2017. *Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah (Pengetahuan Manajemen, Efektivitas, Kemandirian, Keunggulan Bersaing dan Kecerdasan Emosi)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fadhool, M., dan Samputra, P. L. 2025. “Local Knowledge as a Strategy for Village Resilience in Hanjeli Tourism Village, Sukabumi, Indonesia.” *Journal of Social Research*, hlm. 1222–1239.
- Fajar, K. I. D., Rijanta, R., dan Kurniawan, A. 2023. “Eksplorasi Variabel Pembangunan Berkelanjutan untuk Indeks Desa Membangun Pulau Jawa.” *Majalah Geografi Indonesia*, 37(1): 68–75.
- Fatimah, S. 2023. “Analisis Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya di Desa Bulu Cina Kecamatan Hampan Perak.” *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1): 16–26.
- Fatlolon, C. 2022. “Toward a Politics of Inclusion: Prospects and Problems of Civic Participation in Indonesia’s Government Decentralization.” *Melintas*, 38(1): 1–24.
- Hendriawan, M. R., dan Marlina, R. R. 2025. “Pengelompokan Desa di Jawa Barat Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Menggunakan Algoritma Clustering Large Application (CLARA).” 6(1): 35–41.
- Kemendes PDPT. 2016. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun*. Jakarta: Kemendes PDPT.
- Kemendes PDPT. (2023). *Indeks Desa Membangun*. Portal Satu Data Kemendes PDPT. <https://satudata.kemendes.go.id/>
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2024. *Data Indeks Desa Membangun (IDM) 2023*. Jakarta: Portal Satu Data Kemendes PDPT. Diakses dari: <https://satudata.kemendes.go.id/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2023. “Realisasi Penyaluran Dana Desa Capai Rp54,71 Triliun per 13 Oktober 2023.” Diakses dari: <https://kumparan.com/kumparanbisnis/penyaluran-dana-desa-capai-rp-54-71-triliun-per-13-oktober-2023-21QiMEqqlp>
- Lukmawati, R. W., dan Fanida, E. H. 2023. “Strategi Pengembangan Unit Usaha oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.” *Publika*, 11(3).
- Kusuma, N., dan Purwanti, E. 2018. “Village Index Analysis Building to Know the Village Development in Gadingrejo District of Pringsewu.” 6(2): 179–190.
- Pearce, J., dan Robinson, R. 2018. *Strategic Management: Planning for Domestic and Global Competition*. New York: McGraw-Hill.
- Mudhofar, M. 2022. “Analisis Implementasi Good Governance pada Pengelolaan Keuangan Desa.” *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(1): 21–30.
- Niswah, F., dan Meirinawati. 2015. *Manajemen Strategi Sektor Publik*. Surabaya: Unesa University Press.

- Nomainsi, F. 2019. "Evaluasi Indeks Ketahanan Sosial sebagai Bagian dari Penerapan Program Indeks Desa Membangun di Kabupaten Ogan Ilir." hlm. 19–32.
- Pemerintah Desa Kwangsan. 2025. *Profil Desa Kwangsan*. Sidoarjo: Pemerintah Desa Kwangsan. Diakses dari: <https://kwangsan-sedati.desa.id/index.php/artikel/2025/12/3/profil-desa-kwangsan>
- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2024. "Jumlah Desa Menurut Tingkatan Indeks Desa Membangun (IDM) per Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo." Satu Data Kabupaten Sidoarjo. Diakses dari: https://opendata.sidoarjokab.go.id/fa_IR/dataset/jumlah-desamenuuruttingkatanindeksdesamembangun-idm-di-kabupaten-sidoarjo/resource/d80f69aa-89df-41a7-81b6-af035d7606d5
- Pilo, R., Posumah, J. H., dan Tulus, F. 2022. "Administrasi Publik." *Jurnal Administrasi Publik*, 8(3): 203–210.
- Prabaningrum, R. W., dan Oktariyanda, T. A. 2021. "Manajemen Strategi Program Sekolah Lapang Pertanian di Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro." *Publika*, 9(1): 239–252.
- Prayitno, G., Auliah, A., Efendi, A., Hayat, A., dan Subagiyo, A. 2025. "The Role of Livelihood Assets in Affecting Community Adaptive Capacity in Facing Shocks in Karangrejo Village, Indonesia." hlm. 1–17.
- Putra, F. 2023. "Village Governance and Public Participation in Indonesia." 3(2): 55–64.
- Rahmadanita, A., dan Wue, B. C. J. 2024. "Increasing the Capacity of Village Apparatus in Implementing Public Service Functions in Baciro Village, Gondokusuman Sub-District, Yogyakarta City." *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 12(2): 198–213.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Lembaran Negara RI.
- Rodiyah, I., Choiriyah, I. U., dan Sukmana, H. 2022. *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Rohman, A. 2018. *Dasar-Dasar Manajemen Publik*. Malang: Empatdua.
- Rusmaningsih, P. N., dan Kusumastuti, R. 2023. *The Portrait of Community Empowerment in Tamansari Village, Banyuwangi, in the Context of Policy and Social Innovation*. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 8(1): 1–11.
- Septianingrum, I. P. K., dan Fanida, E. H. 2024. "Strategi Meningkatkan Perekonomian Desa melalui Optimalisasi Peran BUMDes di Desa Ngampungan Kabupaten Jombang." *Publika*, 12(2): 465–480.
- Shringi, D. K., dan Shrivastava, P. 2023. "Philosophy of Management of Henri Fayol." 11(6): 270–275.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Umam, K. 2014. *Manajemen Perkantoran*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Waruwu, M. 2023. "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Method." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1): 2896–2910.
- Wheelen, T. L., Hunger, J. D., Hoffman, A. N., dan Bamford, C. E. 2017. *Strategic Management and Business Policy: Globalization, Innovation, and Sustainability*. Edisi ke-15. Pearson.
- Wijayanti, I. D. S. 2008. *Manajemen*. Yogyakarta: Mitra Cendekia Press.

